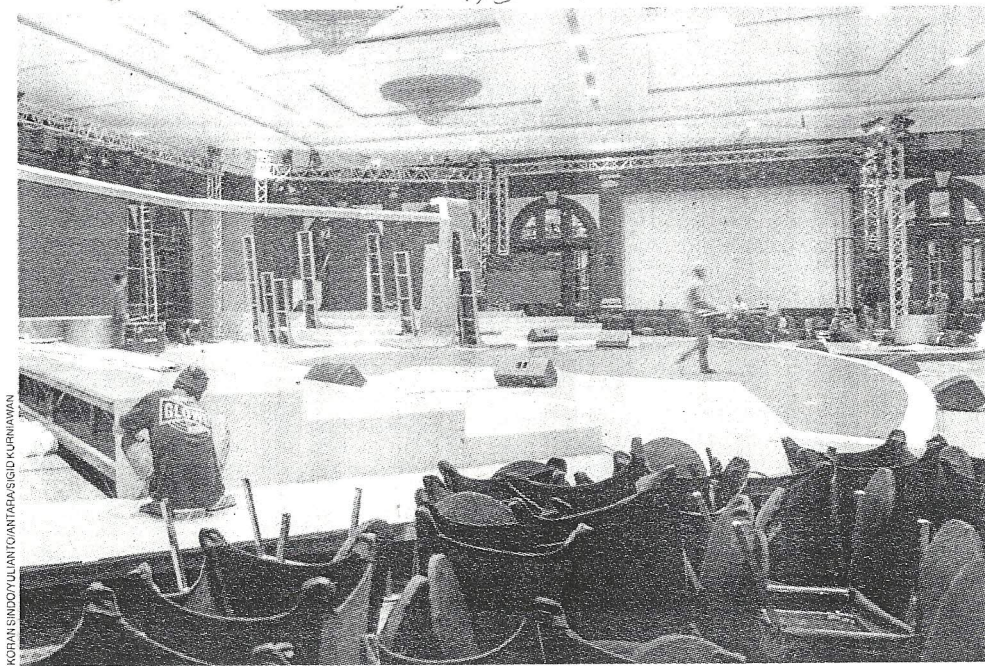


# Penegakan Hukum-HAM Harus Konkret

SINDO - 17 Jan '19.



(Foto kiri-kanan) Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung debat pertama capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin. Debat pertama yang akan diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga Uno tersebut bertema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

**JAKARTA** – Wacana penegakan hukum dan HAM yang menjadi tema debat pertama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) harus menjadi agenda konkret saat mereka terpilih dalam Pemilu 2019.

Jangan sampai berbagai janji yang mereka lontarkan hanya ramai di tataran diskusi, tetapi minim di tataran aksi. Hal itu disampaikan sejumlah tokoh yang hadir dalam diskusi membedah visi-misi capres-cawapres jelang debat perdana di Jakarta kemarin. Inisiator Gerakan Pemilih Rasional Ray Rangkuti melihat, 80% visi dan misi kedua pasangan capres-cawapres kali ini hampir sama. Dan dia menyayangkan visi-misi pasangan calon (paslon) 01 maupun 02 masih berkulat pada tahapan makro.

“Visi dan misi yang ada ha-

nya pada tahapan makro. Dua capres ini 80% visi dan misinya sama. Tidak ada yang signifikan dari visi dan misi secara makro,” katanya. Dia menjelaskan, dua pasangan capres tidak banyak menyinggung langkah-langkah yang lebih konkret untuk mencapai visi misinya. Untuk itu ia berharap, debat pertama besok adalah momentum untuk menjelaskan visi misi yang substansial. Hal itu untuk memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih tidak memberikan cek kosong kepada capres. “Debat besok harus bicara ke substansi

masalah. Itu untuk mencegah hoaks. *Civil society* menyatakan siapa pun yang berkuasa harus melaksanakan cita-cita kebangsaan kita,” ujarnya.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho justru mempertanyakan keseriusan kedua paslon dalam pemberantasan korupsi. Karena visi misi paslon 01 dan 02 tidak memaparkan secara detail upaya menekan angka korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi dalam visi misi keduanya masih normatif dan penerapannya mengambang. “Bahkan insup pemberantasan korupsi tidak menjadi program prioritas. Tidak ada kejelasan bentuk penguatan KPK misalnya,” kata Emerson pada kesempatan sama.

Emerson juga mengkritisi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon petahana. Dalam empat

tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, ia menilai penegakan hukum terkesan belum bebas dari unsur politik. Misalnya penempatan Jaksa Agung. Menurutnya itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lantaran Jaksa Agung dianggap berafiliasi dengan partai politik tertentu. “Penempatan politisi (sebagai) Jaksa Agung membuat pemerintah Jokowi memberikan pengaruh, menurun tingkat kepercayaannya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama tidak berani menargetkan peringkat Indonesia dalam indeks persepsi korupsi. “Tanpa ada indikator yang jelas. Berani enggak mereka *targetin* indeks persepsi korupsi kita selama dia menjabat ke skor tertentu,”

Mantan Wakil Ketua Ko-

misi Nasional (Komnas) HAM M Ridha Saleh berpandangan, isu HAM tidak bisa dihindari dari debat nanti karena tiap paslon memiliki sejarah dalam kasus HAM. Tapi, pelanggaran HAM ini jangan dipolitisasi, tapi justru dicarikan langkah yang konkret untuk ke depannya. “Pelanggaran HAM ini jangan dipolitisasi, justru kita ingin adanya penegakan hukum yang konkret di Indonesia untuk pencegahan terulangnya pelanggaran HAM,” ujarnya.

Disisilain anggota Jaringan Guru Besar Antikorupsi Hariadi Kartodihardjo lebih menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang punya potensi sangat besar atas terjadinya tindak pidana korupsi. Namun yang jadi soal, peningkatan atas korupsi dalam pengelolaan SDA tersebut sangat sulit dilakukan. “Kalau

dilihat dari perkembangannya, saya lebih melihat yang terkait dengan SDA. SDA yang sangat penting dalam konstelasi baik itu peningkatan kekayaan negara maupun terkait dengan keadilan sosial,” katanya.

## KPU Ingatkan Pendukung agar Tertib

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memberikan kesempatan kepada aparat relawan pendukung hadir dalam debat kandidat perdana Kamis besok. Namun, Wahyu meminta agar tim paslon menertibkan para pendukungnya masing-masing. “Karena

kapasitas ruangan tidak memadai, hanya cukup untuk 500 undangan maka kami menyediakan ruangan terbuka untuk masing-masing pendukung paslon capres cawapres untuk menonton melalui layar lebar,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Selain membolehkan para pendukung hadir, Wahyu mengimbau lembaga juga mengizinkan kepada masing-masing tim paslon membawa atribut. Menurut Wahyu, pihaknya hanya akan mengatur atribut yang berada di ruang debat.

✪ **kiswondari**  
mula akmal

PENGUMUMAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
PT BALI SEMINYAR SEJANTERA  
(Perkara No. 188/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Mengumumkan kepada masyarakat publik bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membatalkan Birtusa No. 128/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan amar pada pokoknya